

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Bernhard Limbong. 2014. *Politik Pertanahan*. Jakarta. Pustaka Margaretha
- Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Elza Syarif. 2014. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)
- Philipus M. Hadjon, dkk. 2004. *Pengantar hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- R, Soegijatno Tjakranegara. 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- R. Wiyono. 2009. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta. Sinar Grafika,
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- SF Marbun, dkk. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. UI Press.
- Supriadi. 2012. *Hukum Agraria*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Titik Triwulan dan Isnu Gunadi Widodo. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta. Kencana Media Group.
- Urip Santoso. 2010. *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*. Jakarta. Kencana.
- Urip Santoso. 2011. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta. Kencana.

Yuslim. 2015. *Hukum Acara Pradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta. Sinar Grafika.

Zairin Harahap. 2007. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara.

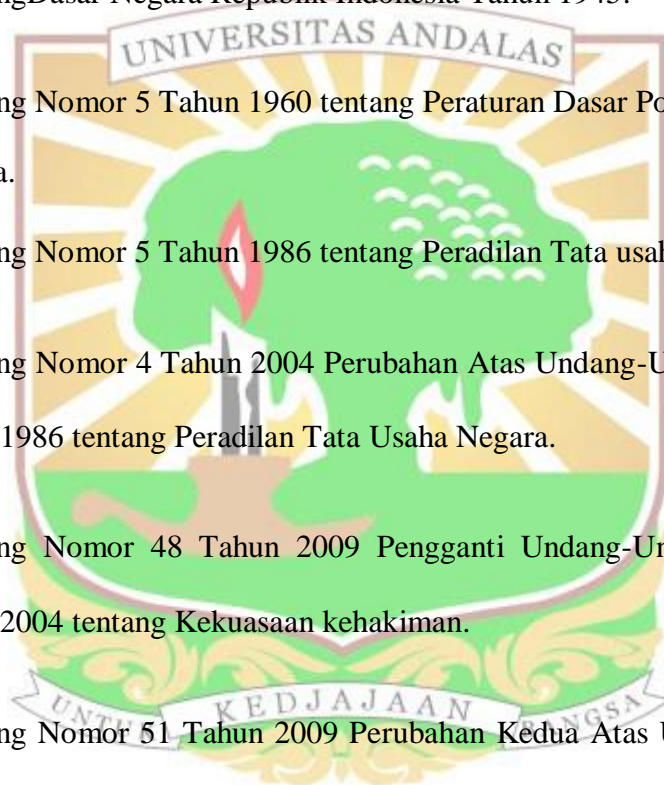
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.



Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

C. Website

Hak Guna Usaha, <http://www.jurnalhukum.com/hak-guna-usaha/> diakses Tanggal 4 Oktober 2015 Pukul 01.35

Pengertian Struktur Organisasi, https://id.wikipedia.org/wiki/Struktur_organisasi diakses tanggal 12 Februari 2016 pukul 11.00 WIB

Tugas dan Fungsi PTUN Padang, <http://ptun-padang.go.id/statis-78-tugaspokokdanfungsi.html> diakses tanggal 12 Februari 2016 Pukul 13.00 wib

